

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang hal-hal yang mendasari pentingnya pelaksanaan penelitian berdasarkan data pendukung dalam perspektif teoretis dan praktis. Data teoretis yaitu penggunaan konsep atau teori yang relevan dan data praktis merupakan uraian isu dan permasalahan penelitian yang diperoleh dari hasil studi pendahuluan dan hasil penelusuran penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga dirumuskan permasalahan-permasalahan penelitian dan dilanjutkan dengan uraian tujuan dan manfaat penelitian. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa sub bagian pada bagian ini yaitu 1) latar belakang; 2) rumusan masalah; 3) tujuan penelitian; 4) manfaat penelitian; dan 5) struktur organisasi disertasi.

1.1 Latar Belakang

Kemampuan berbicara di depan publik sangat penting bagi peningkatan keterampilan akademik dan profesional, kompetensi pribadi dan sosial, keunggulan kompetitif, kredibilitas, dan reputasi positif (Devito, 2016; Carolina, dkk. 2015). Kesuksesan seseorang ditentukan oleh keterampilannya dalam mengungkapkan pikiran secara tepat dan meyakinkan (Rafanani, 2017). Di sisi lain, perkembangan teknologi dan informasi dengan kecenderungan manusia berinteraksi tanpa batas dalam era globalisasi menjadikan kemampuan berbicara di depan publik sangat dibutuhkan (Pane, 2013). Oleh karena itu, kemampuan tersebut telah menjadi tuntutan bagi banyak kalangan dan profesi di abad ini (Rogers, 2018: 45).

Secara garis besar, kemampuan berbicara di depan publik ditentukan oleh empat faktor, yaitu isi, organisasi materi, bahasa, dan penyampaian (Devito, 2016:30). Isi berkaitan dengan kesesuaian materi yang disampaikan pembicara dengan kebutuhan pendengar. Pengorganisasian materi terkait dengan pengaturan sistematika ide-ide utama yang akan disampaikan pembicara dan selanjutnya dikembangkan dalam beberapa bagian, yaitu pendahuluan, kesimpulan, dan transisi. Bahasa merupakan variabel yang paling kompleks dari berbagai aspek

yang terlibat dalam keseluruhan proses berbicara di depan umum dan merupakan variabel yang paling banyak menghasilkan penelitian dan teori. Aspek penyampaian merupakan aspek yang terkait dengan penggunaan bahasa nonverbal dalam kegiatan berbicara di depan publik. Berbicara di depan publik merupakan tindakan khusus dalam komunikasi lisan yang menggabungkan faktor fisiologis, linguistik, psikologis, dan budaya (Carolina, dkk. 2015). Fisiologis adalah sistem artikulator yang digunakan ketika seseorang berbicara. Linguistik merupakan aspek kebahasaan sebagai media dalam mengungkapkan isi pembicaraan, dan dalam perspektif psikologis, berbicara dikaitkan dengan keberadaan mental dan cara berpikir seseorang ketika berbicara. Kemampuan berbicara untuk meyakinkan pendengar bergantung kepada tiga aspek pembuktian, yaitu logika (*logos*), etika (*ethos*), dan emosional (*pathos*) (Aristoteles dalam Griffin, 2011). Pembuktian logika berangkat dari argumentasi pembicara atau seorang orator. Pembuktian etika dilihat dari bagaimana karakter dari pembicara dapat terungkap melalui pesan-pesan yang disampaikan kepada pendengar, dan pembuktian emosional dapat dirasakan dari bagaimana transmisi perasaan dari pembicara mampu tersampaikan kepada pendengar.

Kemampuan berbicara di depan publik bukanlah bakat alami yang bisa dilakukan semua orang tanpa belajar dan latihan (Rogers, 2018: 26). Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis kesulitan berbicara di depan publik, seperti penelitian tentang faktor kecemasan berbicara (Anderson, 2005; Shi, dkk., 2015) dan penelitian tentang pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa (Pane, 2011; Intachakra, 2012; Ryabova, 2015).

Kesulitan berbicara di depan publik menjadi salah satu hal yang banyak dijadikan objek penelitian. Pada tahun 2013, Wahyuni meneliti hubungan antara kepercayaan diri dengan kecemasan seseorang berbicara di depan publik. Penelitian mengenai solusi kecemasan berbicara di depan publik pun telah banyak dilakukan, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2014) tentang penerapan terapi NLP (*Neuro Linguistic Programming*) dan penelitian Fitri (2017) tentang

efektivitas cognitive behaviour therapy untuk menurunkan kecemasan berbicara di depan publik.

Selain penelitian kecemasan berbicara, penelitian lain terkait kesulitan berbicara di depan publik yang banyak diteliti yaitu penelitian aspek kesantunan berbahasa. Penelitian terdahulu mengenai kesantunan berbahasa, misalnya penelitian fenomena kesantunan berbahasa politisi dalam acara *talk show* di televisi (Aditiansyah, 2013; Barus, 2014; Arif, 2015; Nursolihah, 2019). Pada tahun 2019, Manurung juga melakukan penelitian tentang kesantunan berbahasa dalam debat calon gubernur dan pada tahun 2020. Arum & Santosa melakukan penelitian mengenai pelanggaran kesantunan berbahasa politisi dalam kontroversi ancaman *people power* pascapilpres.

Penelitian kesantunan berbahasa menjadi penting dilakukan, karena tidak hanya terkait dengan problematika individu, tetapi juga berdampak terhadap problematika sosial (Mustika, 2013). Dalam artikel penelitian Ridealgh (2020) diungkapkan bahwa konsep kesantunan berasal dari penelitian yang dilakukan pada tahun 1980-an tentang fenomena *wakimae* di Jepang. Kesantunan berbahasa adalah salah satu norma sosial yang perlu diaktualisasikan dalam berbagai aspek kehidupan untuk memelihara interaksi dalam berkomunikasi (Noelia, dkk., 2015). Penelitian kesantunan berbahasa telah banyak dilakukan di berbagai negara dengan perspektif yang berbeda-beda (Haugh, 2007; Terkourafi, 2011; Stranovska, dkk., 2013; Lowrey & Kinberg, 2020; Grace, dkk., 2022).

Tidak jarang pelanggaran kesantunan berbahasa menjadi sumber terjadinya perpecahan dan pertikaian, baik antar individu maupun antar kelompok. Dalam artikel penelitian Pane (2011) diungkapkan bahwa salah satu faktor terjadinya pelanggaran kesantunan berbahasa dalam berbicara adalah faktor emosi. Oleh karena itu, penting bagi penutur untuk memahami cara mengendalikan emosi dalam berbahasa, seperti yang diungkapkan dalam artikel penelitian Siby (2018) bahwa kesantunan dalam bertutur dapat dibangun melalui kecerdasan emosi. Selain disebabkan oleh faktor emosi, pelanggaran kesantunan berbahasa pun dapat terjadi karena ketidakmampuan penutur menggunakan bahasa yang tepat dalam

berbicara (Sari, 2018). Banyak orang yang sukses berbicara dengan kepercayaan diri yang tinggi dan retorika yang tajam, tetapi sulit menghindari pelanggaran kesantunan berbahasa dalam berbicara.

Sikap santun dalam berbahasa, baik secara lisan maupun tulisan merupakan hal yang sangat fundamental dalam upaya menciptakan keharmonisan komunikasi antara penutur dan mitra tutur. Meskipun demikian, kesantunan berbahasa memiliki ruang tersendiri dalam konteks politik. Politisi selalu diperhadapkan dengan berbagai konteks komunikasi yang mengharuskan mereka berbicara secara keras dan tegas, misalnya ketika mengkritik kebijakan pemerintah. Politisi adalah pejuang rakyat yang memang hadir untuk bersuara dan menyampaikan berbagai problematika masyarakat kepada para pengambil kebijakan.

Pelanggaran kesantunan berbahasa seperti ujaran kebencian rentan diperhadapkan dengan hak berpendapat dan berekspresi (Widayati, 2018). Oleh karena itu, dalam konteks politik perlu dirumuskan konsep kesantunan berbahasa tersendiri yang berbeda dengan prinsip kesantunan berbahasa yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap para pembuat kebijakan hukum, khususnya dalam hal memberikan batasan antara ujaran kebencian dan kritik.

Oleh karena itu, untuk merumuskan prinsip kesantunan yang bersifat universal, dibutuhkan perpaduan lebih dari satu teori kesantunan berbahasa yang relevan dengan konteks pertuturan. Dari hasil kajian teoretis, diperoleh satu konsep kesantunan berbahasa yang relevan digunakan dalam penelitian ini yaitu Prinsip Saling Tegang Rasa (PSTR) atau *Principle of Mutual Consideration* (PMC) (Aziz, 2012). Teori kesantunan berbahasa tersebut dirumuskan dalam pernyataan prinsip: *Terhadap mitra tutur Anda, gunakanlah tuturan yang Anda sendiri pasti akan menyukainya apabila tuturan tersebut digunakan orang lain kepada Anda* atau dengan pengertian sebaliknya bahwa: *Terhadap mitra tutur Anda, jangan gunakan tuturan yang Anda sendiri pasti tidak akan menyukainya apabila tuturan tersebut digunakan orang lain kepada Anda*. Aziz (2012) merumuskan PSTR/PMC

di atas empat nilai dasar, yaitu: 1) daya sanjung dan daya luka; 2) prinsip berbagi rasa; 3) prinsip kesan pertama; dan 4) prinsip berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi terhadap profil kemampuan berbicara di depan publik para politisi di Ternate Provinsi Maluku Utara, diperoleh data permasalahan yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Data yang diperoleh berhubungan dengan permasalahan dan kebutuhan politisi untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik. Permasalahan utama yang ditemukan terletak pada aspek bahasa yang digunakan politisi, khususnya pada indikator kesantunan berbahasa. Pelanggaran kesantunan berbahasa yang banyak terjadi di Ternate sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara adalah ujaran kebencian dan ujaran yang mengandung hoaks atau berita bohong. Pada Pilkada 2018, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia mengungkapkan bahwa Provinsi Maluku Utara termasuk salah satu dari 12 provinsi yang masuk dalam kategori rawan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, potensi terjadinya kericuhan terkait isu-isu pilkada menjadi tinggi di wilayah tersebut.

Berdasarkan data catatan register perkara SUBDIT/V TIPIDSIBER Polda Maluku Utara selama tahun 2020 secara keseluruhan terdapat 46 kasus pelanggaran kesantunan berbahasa yang diadakan oleh masyarakat ke Kepolisian Daerah Maluku Utara yang terdiri dari 26 kasus ujaran kebencian (penghinaan) dan 20 kasus ujaran hoaks (fitnah) dengan progres penanganan perkara, yakni 8 diantaranya dinyatakan lengkap (P21), 3 diantaranya dalam proses proses sidik, sementara 15 masih dalam tahap penyelesaian dan 20 lainnya dinyatakan tidak cukup bukti, sehingga proses penyelidikannya dihentikan dengan diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan bukan tindak pidana, serta dihentikan.

Kasus ujaran kebencian dan ujaran berita hoaks menjadi permasalahan sosial yang sangat memprihantinkan. Ketika data statistik tersebut dikonversi ke dalam persentase maka angka kasus pelanggaran kesantunan berbahasa yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara terbilang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kasus-kasus kejahatan konvensional pada tahun yang sama.

Haerul, 2022

PENGEMBANGAN MODEL REFLEKTIF BERBASIS KESANTUNAN BERBAHASA DALAM PELATIHAN BERBICARA POLITISI DI TERNATE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pelanggaran kesantunan berbahasa dalam bentuk ujaran kebencian dan berita bohong bertujuan menyerang kebijakan pemerintah. Para pelaku biasanya beralih dengan sikap kritis kepada kebijakan pemerintah yang sesuai dengan konsep kebebasan berpendapat (*freedom of speech*). Padahal, menurut Gunawan (2004) bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara sikap kritis dengan ujaran kebencian dan ujaran yang mengandung hoaks. Dalih kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) kemudian bertransformasi menjadi kebebasan menghasut atau membenci (*freedom to hate*).

Jika ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong sebagai bentuk pelanggaran kesantunan berbahasa terus dibiarkan terjadi, negara akan semakin terbawa ke dalam bahaya perpecahan dan konflik sosial (Republika, 2018). Terdapat beberapa instrumen internasional yang terkait dengan ujaran kebencian, yaitu: Deklarasi HAM PBB 1948; Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (*Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination*); dan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Peraturan perundang-undangan lainnya yang sekaitan dengan kesantunan berbahasa, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memuat larangan dan ancaman pidana bagi pelaku yang membuat ujaran kebencian ataupun berita bohong. Ancaman pidana juga ditujukan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA (Pasal 28 ayat (1) Pasal 45 UU ITE).

Selain Undang-Undang ITE, Pasal 207 dan Pasal 310 Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat larangan melakukan penghinaan dengan segala bentuknya yang menyerang kehormatan dan nama baik. Polri pun telah mengeluarkan Surat Edaran No: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE Polri). Menurut Polri, bentuk ujaran kebencian antara lain:

Haerul, 2022

PENGEMBANGAN MODEL REFLEKTIF BERBASIS KESANTUNAN BERBAHASA DALAM PELATIHAN BERBICARA POLITISI DI TERNATE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, , memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong yang memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Dalam perspektif maksim kesantunan berbahasa Leech (1993), ujaran kebencian dan *hoax* merupakan cara berbahasa yang melanggar maksim kesantunan berbahasa. Namun, maksim kesantunan berbahasa Leech kurang relevan jika diimplementasikan terhadap cara bicara berpolitik dalam konteks memberikan kritik kepada pemerintah. Maksim kesantunan berbahasa tersebut hanya berselaras dengan cara berbahasa politisi ketika berhadapan dengan masyarakat dalam upaya untuk meraih simpati dan dukungan politik.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mengeksplorasi pengalaman dari suatu masalah adalah melalui keterampilan berpikir reflektif. Berpikir reflektif merupakan keterampilan berpikir yang dapat mengembangkan sikap dan membentuk kepribadian seseorang yang selalu bersikap bijaksana dalam menyikapi berbagai permasalahan atau peristiwa. Keterampilan berpikir reflektif dapat membuat seseorang selalu bersikap optimis dan berpikir positif dalam menjalani kehidupan.

Berdasarkan hasil wawancara politisi, diperoleh data bahwa selama ini banyak politisi yang saling menyalahkan atau saling menyerang antar politisi. Kemampuan berbicara politisi selama ini masih kurang pada bagian kesantunan. Cara berbicara politisi masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal penghargaan terhadap sesama politisi. Terkadang ada politisi yang tidak mampu menguasai diri dan mengontrol emosinya ketika berbicara. Ketika seorang politisi berbicara dalam situasi normal, cara bicarannya masih terkontrol, tetapi ketika diperhadapkan dengan situasi yang memanas, terkadang mengungkapkan ujaran-ujaran yang melanggar nilai kesantunan berbahasa yang berlaku di masyarakat.

Beberapa responden dari politisi mengungkapkan bahwa terkadang ada politisi yang mengumpulkan dukungan masyarakat dengan menjatuhkan pihak lain. Padahal, politisi sebagai wakil rakyat seharusnya mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Pembicara atau politisi yang baik, bukan hanya mampu

berbicara secara retorik, tetapi juga mampu mamatuhi prinsip-prinsip berbicara yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Salah satu tugas politisi adalah memberikan kritikan, tetapi tetap dibatasi oleh ruang budaya ketika berbahasa. Banyak politisi yang selalu mengungkapkan ujaran kebencian ketika berbicara. Tidak jarang politisi yang saling menjelekkkan di depan masyarakat. Hal itu dilakukan demi sebuah kemenangan dalam persaingan politik.

Data dari respons masyarakat yang diperoleh melalui penyebaran angket menunjukkan bahwa selama ini masih banyak politisi yang belum mampu berbicara di depan publik dengan baik, terutama ketika dinilai dalam perspektif kesantunan berbahasa. Beberapa responden dari masyarakat menganggap bahwa politisi sudah memiliki kemampuan berbicara yang baik dari segi retorik, tetapi masih kurang pada aspek kesantunan berbahasa. Kemampuan berbicara politisi yang dibutuhkan adalah kemampuan berbicara yang didukung oleh nilai-nilai kesantunan berbahasa sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Masyarakat menginginkan politisi yang saling menghargai satu sama lain ketika berbicara di depan publik. Politisi harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dalam hal kesantunan berbahasa. Saran yang paling banyak diberikan oleh masyarakat adalah saran yang berhubungan dengan pengembangan sikap dan kesantunan berbahasa politisi ketika berbicara di depan publik. Beberapa responden menyarankan bahwa perlu disediakan sebuah wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kesantunan berbicara politisi secara konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan data hasil tes kemampuan awal politisi dalam berbicara di depan publik, dapat diuraikan bahwa nilai kemampuan berbicara politisi rata-rata 72 dengan kategori tinggi. Namun, ketika nilai kemampuan berbicara politisi ditinjau dari setiap aspek, terlihat bahwa aspek kemampuan berbicara yang masih rendah, yaitu aspek bahasa, terutama pada indikator kesantunan berbahasa. Data studi pendahuluan menunjukkan bahwa dibutuhkan peningkatan profesionalisme politisi, khususnya terkait kesantunan dalam berbicara di depan publik. Salah satu permasalahan dalam dunia politik hari ini adalah terkait pelanggaran kesantunan

berbahasa dalam berbagai media komunikasi. Masyarakat menyarankan agar para politisi mampu membudayakan sikap santun dalam berbahasa.

Pelatihan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberikan keterampilan berpikir reflektif kepada politisi. Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang lebih menekankan praktik daripada teori. Pelatihan dilakukan seseorang atau kelompok dengan menggunakan berbagai pendekatan dan bertujuan meningkatkan kemampuan dalam satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu (Santoso, 2010). Pelatihan merupakan wadah pengembangan sumber daya manusia (Kaswan, 2013; Wahyuni & Suryalena, 2017). Pelatihan membuat seseorang lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan akan bermanfaat untuk meningkatkan hasil kerjanya (Bangun, 2012; Boe, 2014). Pelatihan adalah suatu proses yang dapat memperbaiki keterampilan seseorang, sehingga dapat mencapai suatu tujuan. Hal tersebut dilakukan secara bersama-sama demi kepentingan individu dan kepentingan organisasi atau kelompok (Sinambela, 2016).

Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti bermaksud mengembangkan model pelatihan yang mampu memberikan keterampilan berpikir reflektif berbasis kesantunan berbahasa kepada politisi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi masalah pelanggaran kesantunan berbahasa dalam berbicara di depan publik pada politisi. Hasil analisis masalah dan kebutuhan politisi yang diperkuat dengan kajian teoretis yang relevan dijadikan sebagai dasar pengembangan model pelatihan dalam penelitian ini. Pengembangan model pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik dan mengembangkan sikap dan kesantunan berbahasa politisi.

Model pelatihan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah model reflektif berbasis kesantunan berbahasa. Pelatihan berbicara melalui model reflektif berbasis kesantunan berbahasa didasari oleh teori konstruktivisme. Pandangan filosofis dari konstruktivisme adalah bahwa pengetahuan seseorang terbentuk melalui pengalaman yang diolah secara mental (Hein, 1991; Boghossian, 2006; Muslich, 2007; Muchith, 2008). *Educational Broadcasting Corporation* (2004)

Haerul, 2022

PENGEMBANGAN MODEL REFLEKTIF BERBASIS KESANTUNAN BERBAHASA DALAM PELATIHAN BERBICARA POLITISI DI TERNATE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memberikan batasan bahwa dalam perspektif tataran praktis, konstruktivisme mengarahkan pembelajar untuk melakukan refleksi terhadap pengalamannya dan menciptakan pengetahuan baru. Dewey (1964: 75) mengemukakan bahwa reflektif adalah proses mental tertentu yang menfokuskan dan mengendalikan pola pikiran. Selanjutnya, konsep berpikir reflektif tersebut kemudian dikembangkan oleh Wallace (1991) menjadi model pengajaran yaitu *the reflective model* atau model reflektif.

Dalam sebuah penelitian, reflektif diterapkan sebagai konsep pengajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalisme guru. Dalam penelitian tersebut, para pendidik diminta untuk meningkatkan beberapa aspek dalam melakukan profesinya, yaitu. pengetahuan yang diterima, pengetahuan pengalaman, dan kesadaran melakukan refleksi. Strategi dalam melakukan refleksi meliputi: (a) mengidentifikasi / menjelaskan masalah/situasi, (b) menganalisis dan menafsirkan penyebab/alasan, (c) mendapatkan makna dan aplikasi secara keseluruhan, dan (d) mendapatkan solusi atau cara untuk mencegahnya (Pratiwi, 2012).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Boyd & Fales (1983) dijelaskan bahwa pembelajaran reflektif adalah proses memeriksa dan mengeksplorasi masalah secara internal, dipicu oleh pengalaman, yang menciptakan dan mengklarifikasi makna dalam hal diri, dan yang menghasilkan perspektif konseptual yang berubah. Dalam artikel tersebut digambarkan tentang proses pembelajaran reflektif sebagaimana diidentifikasi melalui analisis tiga set data yang berbeda, termasuk wawancara berurutan, wawancara tunggal, dan kuesioner tertulis, menggunakan tiga sampel terpisah. Wawancara berurutan mengungkapkan pola menyadari pola belajar reflektif sendiri dan memutuskan untuk menggunakannya secara sadar. Kemudian, enam tahap dalam proses pembelajaran reflektif diabstraksikan dan dijelaskan. Implikasi dari proses untuk perubahan dan pertumbuhan pribadi.

Dalam artikel penelitian yang ditulis oleh Jordi (2011) dijelaskan bahwa dalam teori pendidikan orang dewasa, refleksi sebagian besar dikonseptualisasikan sebagai proses analisis rasional melalui dimana manusia mengekstrak pengetahuan

dari pengalaman mereka. Penelitian tersebut mengkritik bias kognitif. Namun, dia berpendapat bahwa perspektif tersebut diwujudkan pembelajaran berdasarkan pengalaman seharusnya tidak memberi preferensi pada tubuh daripada pikiran sebagai sumber pengetahuan. Para peneliti juga tidak boleh menolak refleksi sebagai kognitif semata proses. Praktik reflektif dapat memfasilitasi dialog pembelajaran dalam mewujudkan pengalaman dan aspek konseptual dari kesadaran kita. Jordi mengusulkan seperangkat elemen, karakteristik individu dan pembelajaran pengalaman manusia kolektif, yang dapat memberikan kerangka kerja untuk lebih banyak konseptualisasi refleksi ekspansif dan integratif.

Pemahaman dan penilaian terhadap pemikiran reflektif juga diteliti oleh Lee (2005). Penelitiannya mengkaji kriteria untuk menilai pemikiran reflektif, dan menyelidiki bagaimana proses berpikir reflektif berkembang pada guru-guru pra sekolah. Refleksi guru pra-layanan dinilai dari dua perspektif, yaitu konten dan kedalaman. Temuan mencakup variasi dalam konten, dan bahwa kecepatan di mana pemikiran reflektif menjadi lebih dalam bergantung pada latar belakang pribadi, konteks pengalaman lapangan, dan mode komunikasi. Studi ini mencakup wawasan tentang bagaimana mengukur kualitas pemikiran reflektif dan bagaimana meningkatkan pemikiran reflektif dan menumbuhkan praktisi reflektif, termasuk jenis pengalaman yang dapat dimasukkan dalam program pendidikan guru.

Pelatihan berbicara dalam penelitian ini dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan aplikasi *zoom meeting*. Pengembangan pelatihan berbicara secara virtual merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi pendidikan yang sangat pesat di era globalisasi ini. Salah satu kelebihan dari pelatihan secara virtual adalah dapat dilaksanakan secara fleksibel dan menjadi solusi terhadap keterbatasan ruang dan waktu dalam pelaksanaan pelatihan. Media virtual merupakan salah satu media pendidikan modern yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan diskusi dan kolaborasi dan berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan kompetensi dari berbagai macam profesi, termasuk politisi. Penggunaan wahana virtual dalam penelitian ini diharapkan dapat mempermudah

pelaksanaan penelitian pengembangan model pelatihan berbicara ini, Sehingga, penelitian ini dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil kajian awal secara empiris dan teoretis dari permasalahan dan kebutuhan dalam penelitian ini, maka peneliti terinspirasi dan termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengembangan Model Reflektif Berbasis Kesantunan Berbahasa dalam Pelatihan Berbicara Politisi di Ternate.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan umum dari penelitian ini adalah bagaimanakah model reflektif berbasis kesantunan berbahasa yang efektif digunakan dalam pelatihan berbicara politisi di Ternate?

Secara khusus, rumusan masalah penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana profil kemampuan berbicara di depan publik pada politisi di Ternate?
- 2) Bagaimana desain awal model reflektif berbasis kesantunan berbahasa dalam pelatihan berbicara politisi di Ternate?
- 3) Bagaimana pengembangan model reflektif berbasis kesantunan berbahasa politisi dalam pelatihan berbicara politisi di Ternate?
- 4) Bagaimana respons instruktur dan peserta pelatihan terhadap model reflektif berbasis kesantunan berbahasa dalam pelatihan berbicara politisi di Ternate?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan umum penelitian ini adalah untuk menghasilkan model reflektif berbasis kesantunan berbahasa yang efektif digunakan dalam pelatihan berbicara politisi di Ternate. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan buku panduan pelaksanaan pelatihan berbicara melalui model reflektif berbasis kesantunan berbahasa.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan hal-hal yang diuraikan berikut ini.

- 1) Data profil kemampuan berbicara di depan publik pada politisi di Ternate.
- 2) Desain awal model reflektif berbasis kesantunan berbahasa dalam pelatihan berbicara politisi di Ternate.
- 3) Model reflektif berbasis kesantunan berbahasa dalam pelatihan berbicara politisi di Ternate.
- 4) Data respons instruktur dan peserta pelatihan terhadap model reflektif berbasis kesantunan berbahasa dalam pelatihan berbicara politisi di Ternate.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat tersebut diuraikan berikut ini.

1) Manfaat Teoretis

Secara teoretis, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu kebahasaan (linguistik terapan), khususnya pada bidang keterampilan berbicara dan kesantunan berbahasa. Pada bidang keterampilan berbicara, penelitian ini memberikan konsep berbicara di depan publik khusus untuk politisi, yaitu terkait dengan gagasan pembicaraan, organisasi materi, bahasa, dan cara penyampaian materi pembicaraan. Pada bidang kesantunan berbahasa, penelitian ini memberikan prinsip kesantunan berbahasa yang secara khusus dirumuskan untuk politisi, sehingga relevan diterapkan dalam konteks komunikasi politik. Rumusan kesantunan berbahasa tersebut berbasis konteks komunikasi politik, yaitu konsep kesantunan berbahasa yang sesuai dengan kebutuhan politisi dalam berbicara.

Penelitian pengembangan model reflektif dalam pelatihan berbicara berbasis kesantunan berbahasa ini dilakukan untuk mengembangkan sikap dan kesantunan berbahasa para politisi. Konsep berpikir reflektif membekali politisi dengan pengetahuan tentang cara menyikapi berbagai masalah secara bijaksana,

Haerul, 2022

PENGEMBANGAN MODEL REFLEKTIF BERBASIS KESANTUNAN BERBAHASA DALAM PELATIHAN BERBICARA POLITISI DI TERNATE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yaitu melalui kegiatan deskripsi, analisis, eksplorasi, dan implikasi yang berorientasi kesantunan berbahasa. Hasil penelitian ini dapat pula menjadi referensi pengembangan model pelatihan berbicara yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, seperti pendidik, pelajar, dan masyarakat umum, khususnya dalam aspek pengembangan sikap dan kesantunan berbahasa.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme politisi dalam menjalankan tugas sebagai pejuang rakyat. Penelitian ini menghasilkan model pelatihan berbicara yang mampu membekali politisi dengan kemampuan berpikir reflektif dan kemampuan berbicara di depan publik secara santun, sehingga politisi mampu mendeskripsikan dan menganalisis berbagai masalah secara bijaksana, mengeksplorasi pengalaman berharga dari berbagai peristiwa, dan mengimplikasinya dalam berpikir dan bertindak. Politisi yang mengikuti pelatihan berbicara melalui model reflektif berbasis kesantunan berbahasa akan mampu berbicara dengan bahasa yang bijaksana, rendah hati, penuh penghargaan dan kesimpatian, serta berupaya menjaga perasaan orang lain.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran bagi para praktisi pelatihan berbicara dan para politisi. Pelatihan berbicara melalui model reflektif berbasis kesantunan berbahasa memberikan sebuah formula pelatihan yang tidak hanya berfokus pada aspek kemampuan berbicara secara umum, tetapi juga memperhatikan pengembangan sikap dan kesantunan berbahasa. Model pelatihan ini dapat dimanfaatkan politisi dalam melakukan kaderisasi anggota partai politik, khususnya dalam hal kesantunan berbicara di depan publik. Pembudayaan kesantunan berbahasa dalam berbicara bagi para politisi tidak sekadar menjadi sebuah kepatuhan terhadap norma berbahasa dalam masyarakat, tetapi penggunaan bahasa yang santun di depan masyarakat menjadi salah satu bentuk komunikasi politik yang mampu meraih simpati dan menyentuh hati masyarakat, tanpa menyakiti pihak atau kelompok lain.

Haerul, 2022

PENGEMBANGAN MODEL REFLEKTIF BERBASIS KESANTUNAN BERBAHASA DALAM PELATIHAN BERBICARA POLITISI DI TERNATE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Disertasi ini terdiri dari lima bab dengan uraian sistematika berikut. Pada bab pertama diuraikan mengenai: 1) latar belakang penelitian; 2) rumusan masalah penelitian; 3) tujuan penelitian; 4) manfaat penelitian, dan 5) struktur organisasi disertasi. Pada bab kedua diuraikan kajian teoretis yang relevan dengan rumusan masalah dan kerangka pikir penelitian, review penelitian sejenis, dan definisi operasional. Kajian teoretis merupakan landasan ilmiah dalam melakukan penelitian dan pembahasan pada bab selanjutnya. Teori yang dibahas pada bab dua, yaitu: 1) konstruktivisme sebagai landasan teori reflektif; 2) Teori reflektif dan model reflektif dalam pelatihan; 3) teori kesantunan berbahasa; 4) teori berbicara di depan publik; 5) teori pelatihan virtual; 6) penelitian relevan; dan 7) definisi operasional. Pada bab tiga diuraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari: 1) metode dan desain penelitian; 2) prosedur penelitian; 3) lokasi penelitian; 4) teknik pengumpulan data; dan 5) instrument. Pada bab empat diuraikan tentang temuan penelitian dan pembahasan. Pada bab lima diuraikan tentang simpulan, implikasi, dan rekomendasi dari hasil penelitian.